

# PEMAKNAAN MAHASISWA TERHADAP DEMOKRASI EKONOMI PANCASILA

**Rizzaludin**

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Yapis Dompu

E-mail: [Rizzaludin88@gmail.com](mailto:Rizzaludin88@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to (1) know in depth about students' understanding in interpreting Pancasila economic democracy (2) knowing the implementation of the basic values of Pancasila economic democracy in student life. This study uses qualitative research with the type of phenomenology. Data collection uses interviews and observation. The results of this study illustrate that students interpret economic democracy as an activity that requires the participation of all parties in order to realize common interests, not the interests of individuals. In interpreting Pancasila economic democracy, students always associate with the five precepts contained in Pancasila. Of the five precepts, Pancasila economic democracy must pay attention to the commands and prohibitions of Allah, do justice to others, prioritize cooperation on the basis of deliberation and mutual agreement, and can realize justice for all parties both related to the distribution of workload and the distribution of work to each - individual. In terms of practice, students always practice the five precepts, namely always buying halal goods, not doing cheating on others, always prioritizing cooperation on the basis of deliberation in economic activities. Economic activities like this aim to realize justice in each individual, namely the equal distribution of work and the distribution of work to each individual

**Keywords:** *Economic Democracy, Pancasila Economic Democracy*

**Abstrak:** penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui secara mendalam tentang pemahaman mahasiswa dalam memaknai demokrasi ekonomi pancasila (2) mengetahui pengamalan nilai-nilai dasar demokrasi ekonomi pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. pengumpulan data menggunakan pendoman wawancara dan pengamatan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa mahasiswa memaknai demokrasi ekonomi sebagai suatu kegiatan yang mengharuskan adanya partisipasi semua pihak dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Dalam memaknai demokrasi ekonomi pancasila mahasiswa selalu mengkaitkan dengan lima sila yang terdapat dalam pancasila. Dari kelima sila tersebut maka kegiatan demokrasi ekonomi pancasila harus memperhatikan perintah dan larang Allah, berbuat adil terhadap sesama, mengutamakan kerjasama atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama, serta dapat mewujudkan keadilan terhadap semua pihak baik yang berkaitan dengan pembagian beban kerja maupun pembagian hasil pekerjaan kepada masing-masing individu. Dalam hal pengamalan, mahasiswa selalu mengamalkan lima sila tersebut, yakni selalu membeli barang yang halal, tidak melakukan kecurang terhadap pihak lain, selalu mengutamakan kerja sama atas dasar musyawarah dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang seperti ini tujuannya untuk mewujudkan keadilan pada setiap inividu, yakni adanya pemerataan pembagian kerja dan pembagian hasil pekerjaan pada setiap individu.

**Kata kunci:** *Demokrasi Ekonomi, Demokrasi Ekonomi Pancasila.*

## I. PENDAHULUAN

Perekonomian nasional harus diberlakukan paham kebersamaan (mutualism) dan kekeluargaan (brotherhood), berikut kepentingan bersama (mutual interest) yang menyertainya, ditempatkan pada kedudukan utama. Hal ini sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, yakni masyarakat yang berkeadilan sosial. Paham kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan dalam kegiatan ekonomi sebenarnya sudah termaktub dalam konstitusi negara Indonesia yakni Pancasila dan UUD 1945, merupakan asas dasar bagi perekonomian nasional. Dalam konstitusi tersebut, kegiatan ekonomi masyarakat harus dapat mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Sri-Edi Swasono, (2009: 8) yang meliputi; (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya atau diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia yang beragama melaksanakan syariah berkat iman kepada hidayah Allah); (2) Kemahusiaan (kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan, penghisapan atau riba); (3) Persatuan (berdasar sosio-nasionalisme Indonesia, kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong royong, bekerjasama, tidak saling mematikan); (4) Kerakyatan (berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan hajat

hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional); (5) Keadilan sosial secara menyeluruh (kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran). Sedangkan dalam UUD 1945, keadilan sosial sudah terjelama pada BAB XIV, Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 dari bab tersebut menegaskan bahwa: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan; (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Uraian di atas sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada. Dimana paham liberalisme masuk pula ke dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia. Sebagian besar Perguruan Tinggi tidak melaksanakan perekonomian dengan konsep demokrasi ekonomi pancasila yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, melainkan lebih mengadopsi ekonomi gaya barat atau liberal, kata Guru Besar Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Indonesia (UI), Profesor Doktor Sri Edi Swasono. Akibatnya, kini Perguruan Tinggi banyak yang tidak lagi menyediakan mata pelajaran bersifat ekonomi kerakyatan, padahal seharusnya menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masih banyak mahasiswa yang tidak mengetahui apa sejatinya demokrasi ekonomi pancasila. Mereka memaknai bahwa kegiatan ekonomi itu sebatas pada bagaimana upaya manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup secara optimal, tanpa memperhartikan aspek-aspek lain seperti, moral agama dan sosial. Padahal dalam kegiatan demokrasi ekonomi pancasila, manusia tidak hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomi saja tetapi juga digerakkan oleh rangsangan sosial dan moral. Mahasiswa dalam membelanjakan uangnya, cenderung membeli barang yang hanya sebatas memenuhi keinginan bukan berdasarkan kebutuhan. Tindakan seperti ini sangat tidak sesuai dengan nilai moral agama yang melarang manusia agar tidak berlebih-lebihan dalam berkonsumsi.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Negeri Malang (UM) yang beralamatkan Jalan Semarang Lima. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pengumpulan data yang

dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara mendalam. Data yang diperoleh ialah data primer bersumber dari mahasiswa semester empat jurusan ekonomi pembangunan Universitas Negeri Malang. Teknik analisis yang digunakan adalah mengikuti model yang dikembangkan Strauss dan Cobin (1990) yang meliputi open coding, axial coding dan selective coding.

## III. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

### A. Makna Demokrasi Ekonomi Pancasila di Kalangan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan

Demokrasi ekonomi menurut mahasiswa selama ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar serta adanya partisipasi semua pihak untuk sama-sama bekerja, menyumbangkan tenaga dan modal dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama, bukan kepentingan orang-seorang. Kepentingan bersama menunjukkan kepentingan semua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Mereka berhak mendapatkan pembagian hasil yang disesuaikan dengan besar kecilnya pekerjaan yang mereka lakukan. Demokrasi ekonomi seperti ini sesuai dengan apa yang telah dijabarkan oleh Arief Budiman (dalam Santosa: 2010), mengartikan bahwa demokrasi ekonomi sebagai sebuah sistem dimana rakyat berperan serta secara substansial dalam menentukan proses produksi dan distribusi. Menurut Arief kalau sebuah masyarakat melaksanakan demokrasi ekonomi, maka diperkirakan masyarakat tersebut akan menjadi egalitarian, dimana semua warga berperan aktif dalam proses produksi (ikut menentukan apa yang akan diproduksi, dan berapa banyak), dan memperoleh hasil-hasil produksi tersebut secara relatif.

Mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan Universitas Negeri Malang tidak sebatas memaknai kegiatan demokrasi ekonomi secara umum melainkan mereka selalu mengkaitkan dengan pancasila yang menjadi dasar falsafah negara Indonesia. Dalam pancasila tersebut, terdapat lima sila yang telah dipahami dan diamalkan oleh mahasiswa dalam melakukan kegiatan ekonomi, diantaranya:

#### 1. Ketuhanan

Kegiatan ekonomi yang berketuhanan sebagaimana temuan dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memperhatikan perintah dan larang Allah. Perintah Allah yang harus dijalankan oleh hambanya yakni berbuat adil terhadap sesama, memproduksi/mengonsumsi barang yang bermanfaat, dan juga halal. Adapun larangan Allah yang harus dihindari dalam kegiatan ekonomi yaitu mengonsumsi/memproduksi barang haram serta menipu pihak lain. Hal ini senada dengan pernyataan Sri-Edi Swasono (2009: 8) yang menyatakan bahwa nilai Ketuhanan dalam kegiatan ekonomi memberlakukan adanya etik dan moral

agama, bukan materialisme, manusia beragama melaksanakan syariah berkat iman sebagai hidayah Allah.

Manusia pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah selain homo-economicus, juga homo metafisikus dan homo mysticus. Ini berarti bahwa dalam demokrasi ekonomi pancasila manusia tidak dilihat hanya dari satu segi saja yaitu instink ekonominya, tetapi sebagai manusia bulat, manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh, ia berpikir, bertindak-laku, dan berbuat, tidak berdasar rangsangan ekonomi saja, tetapi selalu memperhatikan rangsangan-rangsangan atau terangsang oleh faktor-faktor sosial dan moral. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat dimana ia berada, dan faktor-faktor moral dalam hubungannya sebagai titah Tuhan dengan Penciptaannya.

## 2. Kemanusiaan

Berbuat adil terhadap sesama dalam kegiatan ekonomi menunjukkan adanya persamaan hak antar individu dan tidak boleh saling merugikan di antara satu sama lain. Kegiatan ekonomi yang seperti ini telah diperjelas oleh responden dalam temuan peneliti tentang nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan secara adil, seperti menjual barang yang benar-benar bermanfaat bagi pembeli, tidak mematok harga yang berlebih-lebihan kepada pembeli atau tidak berlaku curang. Artinya, dimana manusia diakui dan diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit. Karena itu dikembangkanlah sikap saling mencintai sesama manusia, dan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Temuan ini sesuai dengan pernyataan Sri-Edi Swasono (2009: 8), bahwa nilai kemanusiaan merupakan kegiatan ekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun riba.

## 3. Persatuan

Manusia memanfaatkan dan mempergunakan anugerah Tuhan itu melalui usaha atau kerja, khususnya usaha atau kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan hasil temuan peneliti di lapangan. Dari hasil temuan bahwa kesatuan/usaha bersama dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu kegiatan yang didasari kesadaran, kebersamaan serta tanggung jawab dari semua pihak untuk memikul beban kerja dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama. Beban kerja harus dipikul bersama, dan tidak boleh membebani satu dua orang saja. Hal ini sesuai dengan penjelasan Sri-Edi Swasono (2009:8) yang menyatakan bahwa persatuan dalam kegiatan ekonomi menunjukkan adanya kebersamaan yang berasaskan kekeluargaan, gotong

royong, bekerjasama, dan tidak saling mematikan.

Usaha bersama, gotong royong dan sebagainya merupakan konsep-konsep nilai dasar dalam demokrasi ekonomi pancasila. Nilai-nilai ini merupakan unsur-unsur mutualisme sejauh didasarkan atas interdependensi yang ada antara anggota individu keseluruhan masyarakat. Individu dan kelompok, kendati mengejar pemenuhan maksud-maksudnya yang khusus, tetapi ia hanya mungkin mencapainya di dalam masyarakat, dan untuk sebagian besar hanya mungkin dengan bantuan masyarakat lain. Di pihak lain masyarakat sebagai keseluruhan tergantung atas komponen-komponen individu maupun kolektif, karena tujuannya yaitu kesejahteraan umum, hanya mungkin dicapai melalui partisipasi serta dukungan aktif, cerdas dan kesediaan dari bagian-bagian yang menyusunnya itu.

Usaha bersama, persatuan dan kesatuan usaha di dasarkan atas asas kekeluargaan. Ini hanya dapat berjalan bila disertai asas sepenanggungan atau tanggung bersama dan tanggung jawab timbal balik. Ungkapan yang hidup di tengah masyarakat kita berkenaan dengan ini ialah kebukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, sedih sama derita, gembira sama dirasa, bersatu teguh bercerai runtuh. Dengan perkataan lain, kohesi di dalam, keutuhan, dan stabilitas masyarakat tak mungkin dapat terwujud melalui paksaan dari luar semata-mata, akan tetapi secara esensial merupakan hasil kerjasama dan persaudaraan secara moral serta kewajiban timbal balik. (Tom Gunardi, 1990: 53).

## 4. Kerakyatan yang Mengutamakan Musyawarah-Mufakat

Sebagaimana pejelasan hasil temuan peneliti dalam nilai kesatuan di atas, bahwa kegiatan ekonomi harus dilaksanakan secara sadar, bersama-sama dengan penuh tanggung jawab oleh masing-masing individu dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama, bukan kepentingan orang-seorang. Usaha bersama seperti ini bisa terjadi bila sekelompok orang mengadakan persetujuan untuk melakukan usaha bersama mengejar suatu tujuan yang sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Untuk mencapai kesepakatan bersama dalam kegiatan ekonomi perlu diadakan musyawarah bersama. Musyawarah dalam kegiatan ekonomi maksudnya adanya perundingan pendapat dari setiap individu seperti apa kegiatan ekonomi yang mesti dijalankan bersama dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama. Musyawarah bersama dalam kegiatan ekonomi dapat berupa penentuan pembagian kerja, penentuan sumbangsi modal serta penentuan pemerataan pembagian hasil kerja kepada masing-masing individu sehingga kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat mewujudkan kepentingan bersama.

## 5. Keadilan Sosial

Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama atas dasar musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh masing-masing individu tujuan akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Keadilan secara menyeluruh sebagaimana temuan dalam penelitian ini merupakan suatu keadilan dalam pembagian kerja dan pembagian hasil pekerjaan. Keadilan dalam pembagian kerja memiliki makna bahwa setiap individu memperoleh beban kerja yang disesuaikan dengan kesanggupannya baik dari segi fisik maupun keahlian yang dimiliki oleh individu tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan dalam pembagian hasil kerja ialah adanya pemerataan pembagian hasil kerja kepada masing-masing individu yang disesuaikan dengan besar kecilnya pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Orang yang melakukan pekerjaan yang banyak akan memperoleh pembagian hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang pekerjaannya sedikit. Keadilan seperti ini sesuai dengan perumusan DEPERNAS yang disetujui oleh MPRS dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 (dalam Tom Gunardi, 1990: 153), menyatakan bahwa "Di dalam hubungan antara masyarakat dengan para warganegara, dimana keadilan menampakkan dari sebagai cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat serta alat pemusaannya untuk membagikan segala kenikmatan dan beban bersama dengan secara rata dan merata, menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan rokhaniah serta badaniah para warganya, baik secara perorangan maupun golongan, hingga terlaksana asas sama-rasa sama rata, di mana keadilan tersebut: Keadilan dalam membagi".

### B. Pengamalan Nilai Demokrasi Ekonomi Pancasila yang Dilakukan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan

Sebagaimana penjelasan pada uraian sebelumnya, bahwa mahasiswa memiliki pemahaman tentang demokrasi ekonomi pancasila. Dalam uraian tersebut terdapat lima nilai dasar demokrasi ekonomi pancasila yang merupakan turunan dari sila-sila pancasila yang meliputi sila; (1) Ketuhanan, (2) kemanusiaan, (3) persatuan, (4) kerakyatan (musyawarah-mufakat), dan (5) keadilan sosial. Nilai-nilai dasar demokrasi ekonomi pancasila tersebut tidak hanya sebatas dipahami oleh mahasiswa melainkan telah diaktualisasikan dalam kehidupan sebagaimana uraian berikut.

#### 1. Pengamalan Nilai Ketuhanan dalam Kegiatan Ekonomi

Mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan dalam melakukan kegiatan ekonomi selalu mengedepankan pertimbangan moral agama yang menjadi dasar keyakinannya. Nilai moral yang sering diamalkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan ekonomi yakni berupa halal-haram. Mengonsumsi barang yang halal

merupakan suatu anjuran. Sementara mengonsumsi barang yang haram merupakan suatu larangan yang harus ditinggalkan. Salah satu contoh pertimbangan nilai moral yang diamalkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan ekonomi yakni tatkala membeli nasi untuk dikonsumsi yang harus dipastikan terlebih dahulu oleh mahasiswa adalah nasi yang dijual oleh penjual. Kalau nasi yang dijual itu dipastikan halal, maka mahasiswa tidak ragu untuk membeli nasi ditempat tersebut. Kegiatan ekonomi yang seperti tidak hanya digerakkan oleh rangsangan ekonomi semata tetapi didorong oleh rangsangan moral yang menjadi dasar keyakinan mahasiswa.

Temuan penelitian ini sejalan dengan isi dari butir-butir pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (P4) bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini juga sejalan dengan teori kebenaran Tuhan (divine truth) yang mutlak berlaku bagi umat manusia, universal, kebenaran ini tidak dapat dimengerti oleh rasio atau bertentangan dengan kemauan (keinginan) manusia, sebab tujuan nilai kebenaran ini memang untuk membimbing dan menjinakkan kemauan manusia yang "liar". Kecenderungan manusia untuk menuruti kemauan dan rasio semata-mata akan menjauhkan pribadinya dari berkah untuk menerima kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

#### 2. Pengamalan Nilai Kemanusiaan dalam Kegiatan Ekonomi

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi mahasiswa selalu mengamalkan nilai kemanusiaan yang telah dipahaminya. Indikatornya ialah ketika mahasiswa berbelanja, barang yang mereka beli harus halal, sesuai kebutuhan, bermanfaat serta tidak menipu penjual untuk memperoleh barang tersebut. Disisi lain, tatkala mahasiswa menjual barang ia selalu berlaku adil terhadap pelanggan seperti menimbang beras yang disesuaikan dengan harga dan kuantitas yang dibeli. Kegiatan ekonomi yang seperti ini merupakan kegiatan ekonomi yang humanistik, adil dan beradab, tidak mengenal pemerasan, penghisapan terhadap pihak lain.

Pengamalan kegiatan ekonomi mahasiswa di atas sesuai dengan penjelasan Mubyarto (1987: 45) bahwa manusia berdasarkan pancasila mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai anggota masyarakat, antara hidup materi dan rohani. Manusia pancasila yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa adalah selain homo-economicus, juga homo metafisikus dan homo mysticus. Ini berarti bahwa dalam demokrasi ekonomi pancasila manusia tidak dilihat hanya dari satu segi saja yaitu instink ekonominya, tetapi sebagai manusia bulat, manusia seutuhnya. Sebagai manusia yang utuh, ia berpikir, bertingkah-laku, dan berbuat, tidak berdasar rangsangan ekonomi saja, tetapi selalu memperhatikan rangsangan-rangsangan atau terangsang

oleh faktor-faktor sosial dan moral. Faktor sosial dalam hubungannya dengan manusia lain dan masyarakat di mana ia berada, dan faktor-faktor moral dalam hubungannya sebagai titah Tuhan dengan Penciptaannya.

### **3. Pengamalan Nilai Kesatuan dalam Kegiatan Ekonomi**

Mahasiswa dalam melakukan kegiatan ekonomi baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan kemahasiswaan selalu mengamalkan nilai kesatuan demokrasi ekonomi Pancasila. Salah satu indikator pengamalan nilai kesatuan dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan mahasiswa adalah adanya kebiasaan mengadakan acara makan malam bersama di tempat kontrakan. Secara bersama-sama mereka mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang pilihan makanan, urunan biaya, serta pembagian kerja kepada setiap individu. Setelah partisipasi dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan dianggap selesai, maka setiap individu terus ikut berpartisipasi yang lebih kompleks seperti mengeluarkan urunan biaya, menyumbangkan tenaga untuk bekerja sesuai dengan beban kerja yang dibagikan. Kegiatan seperti ini dilakukan oleh masing-masing individu dengan penuh tanggung jawab sehingga kepentingan bersama tercapai.

Kegiatan ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama juga diamalkan mahasiswa dalam kehidupan keluarga. Mahasiswa selalu mengadakan pembagian kerja untuk meringankan beban kerja orang tua seperti memasak, membersihkan halaman rumah, membersihkan kamar mandi, dan mencuci piring. Beban kerja yang begitu banyak tidak boleh dilaksanakan oleh satu anggota saja dalam lingkungan keluarga responden melainkan dikerjakan secara bersama-sama. Temuan ini sesuai dengan falsafah sapu lidi (dalam Tom Gunardi, 190:55) "ke bukit sama mendaki, ke lurah sama menurun, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, sedih sama diderita, gembira sama dirasa, bersatu teguh bercerai runtuh. Dengan perkataan lain bahwa keutuhan dan stabilitas kegiatan ekonomi keluarga akan terwujud manakala adanya kerjasama dan persaudaraan secara moral serta kewajiban timbal balik.

### **4. Pengamalan Nilai Musyawarah-Mufakat dalam Kegiatan Ekonomi**

Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh responden tentu saja diawali dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan sehingga semua pihak yang ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan beban kerja dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama. Contoh musyawarah-mufakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi ialah responden secara bersama-sama mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang pilihan makanan, urunan biaya, serta pembagian kerja kepada

sertiap individu dalam acara makan malam bersama. Contoh lain pengamalan musyawarah untuk mencapai kesepakatan ialah tatkala responden dan keluarganya memelihara ternak ayam potong. Pekerjaan yang dilakukan oleh mereka sudah dibicarakan bersama. Bapak responden membersihkan kotoran dan mengotrol ayam, kakak mengurus makanan ayam, responden dan adiknya mengurus minuman ayam sementara ibu mengurus pekerjaan rumah.

### **5. Pengamalan Nilai Keadilan Sosial dalam Kegiatan Ekonomi**

Mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan Universitas Negeri Malang dalam melaksanakan kegiatan ekonomi selalu mengamalkan nilai keadilan yang telah dipahaminya melalui proses pembelajaran. Nilai keadilan yang diamalkan oleh mahasiswa tersebut dapat berupa keadilan dalam membagi beban kerja dan keadilan dalam membagikan hasil pekerjaan. Hal ini dapat dilihat dari contoh pengamalan mahasiswa dalam melaksanakan kerjasama di lingkungan keluarga. Mereka telah membagi beban kerja kepada masing-masing anggota keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, seperti kakak yang pertama tugasnya memasak, kakak yang kedua tugasnya bersihin halaman rumah, kakak yang cowok biasanya membersihkan kamar mandi sementara responden itu sendiri tugasnya mencuci piring. Adapun keadilan dalam pembagian hasil kerja pernah dilakukan oleh responden yang memiliki usaha rental komputer. Upah kerja yang diberikan kepada masing-masing karyawan disesuaikan dengan banyaknya jumlah pengetikan. Karyawan yang pengetikannya banyak akan mendapatkan upah kerja yang besar dibandingkan dengan karyawan yang jumlah pengetikannya sedikit.

Temuan hasil penelitian tentang pengamalan nilai keadilan di atas sesuai dengan perumusan DEPERNAS yang disetujui oleh MPRS dalam ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960, yang menyatakan di dalam hubungan antara masyarakat, dimana keadilan menampakkan dari sebagai cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat untuk membagikan segala kenikmatan dan beban-beban bersama dengan cara rata dan merata, menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah, baik sebagai perorangan maupun golongan, sehingga terlaksanalah asas sama rasa sama rata (Tom Gunardi, 1990: 153).

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa selama ini mahasiswa memaknai demokrasi ekonomi sebagai suatu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara sadar dan partisipasi semua pihak untuk sama-sama bekerja, menyumbangkan tenaga dan modal dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama, bukan

kepentingan orang-seorang. Adapun makna demokrasi ekonomi pancasila, di mana mahasiswa selalu mengkaitkan dengan lima sila yang terdapat pada pancasila yakni, Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah untuk mencapai mufakat dan keadilan sosial. Makna kegiatan ekonomi yang berketuhanan menurut mahasiswa merupakan suatu kegiatan ekonomi yang memperhatikan perintah dan larang Allah seperti halnya berbuat adil terhadap sesama, memperhatikan halal-haram serta mengkonsumsi barang yang bermanfaat. Berbuat adil terhadap sesama dalam kegiatan ekonomi menunjukkan adanya persamaan hak antar individu dan tidak boleh saling merungikan di antara satu sama lain dan ini merupakan bagian dari makna kegiatan ekonomi yang memephatikan nilai kemanusiaan sebagaimana yang terdapat dalam sila kedua pancasila.

Kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama sebagaimana yang terdapat dapat dalam makna demokrasi ekonomi, harus diawali dengan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah dalam kegiatan ekonomi maksudnya adanya perundingan pendapat dari setiap individu seperti apa kegiatan ekonomi yang mesti dijalankan bersama dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama. Musyawarah bersama dapat berupa penentuan pembagian kerja, penentuan sumbangsi modal serta penentuan pemerataan pembagian hasil kerja kepada masing-masing individu sehingga kegiatan ekonomi yang dijalankan dapat mewujudkan kepentingan bersama.

Kegiatan ekonomi yang berketuhan, kemanusiaan, persatuan dan musyarah untuk mencapai kesepakatan tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan secara menyeluruh. Keadilan secara menyeluruh segaimana temuan dalam penelitian ini merupakan suatu keadilan dalam pembagian beban kerja dan pembagian hasil pekerjaan. Keadilan dalam pembagian kerja memiliki makna bahwa setiap individu memperoleh beban kerja yang disesuaikan dengan kesanggupannya baik dari segi fisik maupun keahlian yang dimiliki oleh individu tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan keadilan dalam pembagian hasil kerja ialah adanya pemerataan pembagian hasil kerja kepada masing-masing individu yang disesuaikan dengan besar kecilnya pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

Mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan Universitas Negeri Malang tidak hanya sebatas memahami demokrasi ekonomi pancasila melainkan diamalkan dalam kehidupan. Dalam membeli barang untuk dikonsumsi mahasiswa selalu mengedepankan pertimbangan moral agama yakni membeli barang yang halal, bermanfaat, dan sesuai kebutuhan. Untuk memperoleh barang yang dibutuhkan tersebut mahasiswa juga tidak pernah melakukan kecurang yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan. Begitu juga

dalam hal menjual barang, mahasiswa juga tidak pernah mengurangi timbangan sehingga merugikan para pelanggan.

Pemenuhan kebutuhan hidup seperti halnya mengkonsumsi makanan, pernah dilakukan secara bersama-sama oleh mahasiswa. Mereka secara bersama-sama menentukan pilihan makanan, mengeluarkan urunan biaya serta ikut berpartisipasi menyumbangkan tenaga. Namun untuk mencapai keputusan bersama mahasiswa secara bersama-sama mereka mengadakan musyawarah tentang penentuan pilihan makanan, urunan biaya, serta pembagian kerja kepada sertiap individu. Kegiatan ekonomi yang seperti ini tujuannya untuk mewujudkan keadilan pada setiap inividu.

Keadilan dalam kegiatan demokrasi ekonomi pancasila yang diamalkan oleh mahasiswa yakni adanya pemerataan pembagian kerja sebagaimana pelaksanaannya dalam lingkungan keluarga. Mereka telah membagi beban kerja kepada masing-masing anggota keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Disamping itu, mahasiswa juga mengamalkan pemabagian hasil kerja secara adil. Di mana upah kerja yang diberikan kepada masing-masing karyawan disesuaikan dengan banyaknya jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing mereka

## **B. Saran**

Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat memprogramkan dalam kurikulum mata kuliah yang membahas tentang demokrasi ekonomi pancasila baik secara teori maupun dalam bentuk praktek. Hal ini akan membuat universitas lebih fungsional sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan kader-kader ekonomi yang memiliki semangat kebersamaan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sementara bagi peneliti yang mengambil bahan yang sama, diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut tentang kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi dan distribisi yang belum diuraikan dalam temuan ini karena adanya keterbatasan waktu dan biaya penelitian.

## **V. DAFTAR RUJUKAN**

- Asshiddiqie, J. 2010. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas.
- Awang, S.A. 2006. *Konsep Ekonomi Kerakyatan dan Aplikasinya pada Sektor Kehutanan*. Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan-Universitas Gadjah Mada, (Online), (<http://www.ekonomipancasila.org/>), diakses 17 September 2013.
- Djauhari. 2006. *Pergeseran Pemikiran Negara Kesejahteraan Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Jurnal Hukum, (Online), XVI (4): 496, ([http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/220382006/5292IMG\\_0038.pdf](http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/220382006/5292IMG_0038.pdf)), diakses 17 September 2013.

- ..... 2007. *Demokrasi Ekonomi Pasca Amandemen Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Bentuk Kompromi*. Jurnal Hukum, (Online), XVII (1): 37-40, ([http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/220382006/5292IMG\\_0038.pdf](http://cyber.unissula.ac.id/journal/dosen/publikasi/220382006/5292IMG_0038.pdf)), diakses 17 September 2013.
- Ghony, M.D. & Almanshur, F. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gunardi, T. 1990. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*. Bandung: ANGKASA.
- Harsono. 1987. *Ekonomi Pancasila* (Mubyarto & Bodiono, Eds). Yogyakarta: BPFE.
- Ismangil, W. 1988. *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Madjid, A. & Swasono, S.E., Eds). Jakarta: UI-Press.
- John W. Creswell. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubyarto. 1988. *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Majid, A. & Swaspno, S.E., Eds). Jakarta: UI-Press.
- ..... 1987. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES.
- Muhammad, D. 2013. *Liberalisasi Perekonomian Kian Kencang di Perguruan Tinggi* (Online), (<http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita-pendidikan/12/04/17/m2mpp1-liberalisasi-perekonomian-kian-kencang-di-perguruan-tinggi>), diakses 11 September 2013.
- Nurul Zuriah. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rarahardjo, M.D. 2011. *Nalar Ekonomi Politik Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Riduwan. 2006. *Dasar-Dasar Statistika*. Bandung: ALFABETA.
- Riyanto, B. 1987. *Ekonomi Pancasila* (Mubyarto & Budiono, Eds). Yogyakarta: BPFE.
- Santosa, A. 2010. *Ekonomi Kerakyatan Urgensi, Konsep, dan Aplikasi: Sebuah Mimpi dan Peta Jalan Bagi Kemandirian Bangsa*. Yogyakarta: ISBN.
- Sugiharsono. 2009. *Sistem Ekonomi Koperasi sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?* Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, 6 (1). (Online), <http://journal.uny.ac.id/index.php/jep/article/view/587>, diakses 17 September 2013.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Swasono, S.E. 2009. *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila: Menegakkan Ekonomi Pancasila*. Makalah untuk kongres Pancasila Kerjasama Universitas Gadjah Mada dan Mahkamah Konstitusi UGM, Yogyakarta, 30 Mei-1 Juni.
- ..... 2012. *Meluruskan Penyelewengan Mandat Konstitusi Pancasila Nasionalisme Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*. Makalah untuk Kuliah Umum di Universitas Negeri Malang (dan Lembaga Pendidikan Lain di Sekitar Malang), Malang, 4 Juli.
- ..... *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Online), (<http://www.kpi.go.id/download/regulasi/UUD%201945.pdf>), diakses 17 September 2013.